

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN  
ASET DAERAH DI BPKAD PEMERINTAHAN KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

**Mega Yunisa Putri  
Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak**

**Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang  
Email: [megayunisa@gmail.com](mailto:megayunisa@gmail.com)**

***ABSTRACT***

This study purpose to find out and learn about internal control system of assets management runs by BPKAD Tulungagung Regency and do the performance assessment of the Internal Control System using COSO method with the legal basis regulation of PP No 60 in 2008. The data of this study will be obtained by means of field study which is through interview, observation, and documentation. This study is a qualitative descriptive type study. The process of data analysis will be using qualitative method, which is to describe how Internal Control System of assets management which runs on the current assets and how the performance of that Internal Control System viewed from using COSO. This study's result shows that some part of Regency's assets already have Internal Control System with reference from Ministry of Internal Affairs' Regulation No 17 in 2007, however from the results of the interviews there are still some weaknesses on the assets management. From the results of performance assessment of assets management Internal Control System Tulungagung Regency, there are still some weakness points on the Internal Control System such as no comprehensive regulations in the matter of work ethics, less effective of the procedures and planning and reporting methods, as well as the lacks of adequate human resources quantity to perform assets management. From this study's results, it is suggested that the Assets Division may consider improvement proposals that is proposed to fix the weaknesses of Internal Control System which is alleged in this study.

***Keywords : government internal control system, SPIP, COSO***

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang system pengendalian internal pengelolaan aset yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tulungagung dan melakukan penilaian kinerja dari sistem pengendalian internal pengelolaan aset tersebut menggunakan metode COSO dengan landasan hukum PP No 60 Tahun 2008. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi lapangan yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif deskriptif. Proses Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menjelaskan bagaimana SPI pengelolaan aset yang berjalan pada bagian aset saat ini dan bagaimana kinerja dari SPI tersebut ditinjau menggunakan COSO. Hasil Penelitian ini menunjukkan Bahwa bagian aset kabupaten telah memiliki SPI dengan acuan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, namun dari hasil wawancara yang dilakukan masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan asetnya. Dari hasil penilaian kinerja SPI pengelolaan aset kabupaten Tulungagung masih terdapat beberapa titik kelemahan dalam SPInya seperti tidak adanya peraturan yang komprehensif terkait etika kerja, kurang efektifnya prosedur dan metode perencanaan dan pelaporannya, serta kurangnya kuantitas SDM yang memadai untuk melakukan pengelolaan aset. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar Bagian aset dapat mempertimbangkan usulan-usulan perbaikan yang diusulkan untuk memperbaiki kelemahan SPI yang terindikasi pada penelitian ini.

***Kata Kunci: Sistem pengendalian internal pemerintahan, SPIP, COSO.***

## PENDAHULUAN

Pengendalian internal dalam suatu perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintahan mutlak sangat diperlukan, karena semua kegiatan operasional yang dijalankan dan kinerja sangat membutuhkan kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan mampu memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal yang telah dibuat dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui sebelumnya SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, Sumber : (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008  *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah* ) . Tugas auditor internal dalam perusahaan bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha dan juga pengendalian internal, seperti yang dinyatakan oleh Mulyadi (2002:29): “Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan(perusahaan Negara maupun swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

Mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa setiap SKPD diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri sumber-sumber dana dan kegiatan operasionalnya yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban daerah. Sehingga sangat diperlukan system pengendalian internal yang dapat menjamin dan mengendalikan atas kegiatan tersebut dari setiap daerah agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan awal kegiatan tersebut. Begitu pula pada pemerintahan yang ada di Kabupaten Tulungagung, BPKAD sebagai SKPKD sekaligus SKPD, harus memiliki system pengendalian internal yang terintegritas dalam hal kegiatan pengelolaan keuangan termasuk asset tetap daerah Kabupaten Tulungagung agar tujuan dari kegiatan pengelolaan keuangan terkait asset tetap yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tercapai dari tujuan yang telah dibuat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ridwan (2011) dengan judul penelitian Analisis Pengendalian Internal atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa titik kritis yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan membuat pengendalian internal yang baik diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Selanjutnya hasil penelitian Diana Sari (2009), dengan judul penelitian Pengaruh Pengendalian Internal

Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ditemukan beberapa titik kritis yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan membuat pengendalian internal yang baik diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Dalam Keberhasilan dalam penyajian keuangan daerah dipengaruhi oleh factor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, maka penelitian ini merumuskan beberapa masalah seperti berikut : 1) Apakah terdapat sistem pengendalian internal pengelolaan Aset yang saat ini dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana kinerja dari sistem pengendalian internal pengelolaan Aset yang dijalankan BPKAD Kabupaten Tulungagung ditinjau dengan COSO?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ditujukan untuk : a) Mengetahui dan mempelajari tentang system pengendalian internal pengelolaan keuangan khususnya aset tetap yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Tulungagung. b) Mengetahui dan mempelajari serta menilai kinerja dari system pengendalian internal tersebut yang ditinjau dari pendekatan COSO.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengertian Sistem**

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. W. Gerald Cole dalam Baridwan mengungkapkan bahwa system adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Pengertian sederhana menurut Anthony dan Govindarajan (2005:7), system merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitive untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sedangkan prosedur, menurut Mulyadi (2001:5) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi suatu organisasi yang terjadi berulang-ulang. O'Brien dan Marakas (2008) mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan dengan batasan yang jelas, bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi teratur. Sistem memiliki tiga fungsi dasar, yaitu: input, process, dan output. Menurut Nelson et al. (2002) sistem adalah sebuah kumpulan orang, mesin dan prosedur yang terorganisir dalam keadaan saling kebergantungan untuk menyelesaikan sekumpulan fungsi tertentu. Kumpulan tersebut memiliki kemampuan memproduksi, menggunakan, mengubah, atau pertukaran informasi dalam memenuhi tujuan. Menurut McLeod (2001), sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa argument diatas dapat disimpulkan sistem adalah sekumpulan objek seperti manusia, sumber daya, konsep, dan prosedur yang bertujuan untuk menampilkan fungsi yang dapat diidentifikasi atau untuk mendukung keputusan.

### **Karakteristik Sistem**

Sistem mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a) **Memiliki Komponen**  
Sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan, berinteraksi membentuk suatu kesatuan. Sekecil apapun suatu system, selalu mengandung komponen atau subsistem-subsistem yang merupakan komponen-komponen dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari system untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.
- b) **Batas Sistem**  
Batas system merupakan batasan yang membatasi dari suatu system dengan system lainnya atau dengan lingkungan luarnya yang bukan didalam lingkup system tersebut. Sehingga batas suatu system menunjukkan ruang lingkup dari system tersebut.
- c) **Penghubung Sistem**  
Penghubung system merupakan media penghubung antara satu komponen system dengan komponen system lainnya.

d) Masukan system

Masukan system dapat berupa masukan sinyal dan masukan perawatan. Masukan sinyal adalah energy yang diproses untuk mendapatkan keluaran sedangkan masukan perawatan adalah energy yang dimasukkan supaya system itu dapat dioperasikan. Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa masukan system adalah energy yang dimasukkan kedalam system agar dapat beroperasi dan menciptakan suatu keluaran dari operasionalnya.

e) Keluaran Sistem

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setelah dimasukkannya energy kedalam system, maka dari energy tersebut dapat dihasilkan suatu keluaran system. Sehingga keluaran system merupakan hasil dari energy yang diolah oleh system.

f) Pengolah Sistem

Pengolah system merupakan bagian yang melakukan proses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan

g) Sasaran system

Sasaran system dapat dikatakan sebagai tujuan dari system. Dengan kata lain system diciptakan karena ada sasaran dan tujuan tersebut. System tidak akan ada gunanya bila tidak memiliki sasaran atau tujuan.

Dari penjelasan tentang komponen system ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu system terdiri dari unsure-unsur yang membentuknya seperti, input, proses, output dan batasan. Unsur-unsur yang merupakan komponen dari system tersebut akan saling berhubungan erat dan bekerja sama dalam mencapai tujuan awal dari pembuatan system tersebut.

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Gelinas, Orams, dan Wiggins (1997) system informasi akuntansi didefinisikan sebagai subsistem khusus dari system informasi manajemen yang tujuannya adalah menghimpun, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Wilkinson (2000) mendefinisikan system informasi akuntansi adalah sebuah keasatuan yang terstruktur yang menggunakan sumber daya fisik guna mengubah data ekonomis menjadi informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak eksternal maupun internal. Menurut Bodnar dan Hopwood (2006), yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf menyatakan bahwa, "Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan."

### **Tujuan Sistem Informasi Akuntansi**

Wilkinson (2000) menjelaskan tujuan dari system informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mendukung fungsi kepengurusan
- b) Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen
- c) Untuk mendukung kegiatan operasi harian organisasi

Dari penjelasan yang dijabarkan oleh Wilkinson diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari system informasi akuntansi adalah menampilkan informasi terkait kegiatan akuntansi kepada para pemakainya, baik pemakai internal, ataupun pemakai eksternal yang digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan yang tepat.

### **Sistem Pengendalian Internal**

“Pengendalian internal mempunyai arti penting bagi kelangsungan usaha perusahaan, karena pengendalian internal merupakan tindakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu terjadinya proses kerja yang efisien dan efektif serta ekonomis” (Kosasih, 2005). Menurut Bodnar dan Hopwood (2005) Pengendalian internal mempunyai arti yang sempit dan arti yang luas, Dalam arti yang sempit, pengendalian intern hanya merupakan pengecekan atau pengawasan, sedangkan dalam arti yang luas pengendalian internal merupakan segala peralatan yang digunakan manajemen dalam melaksanakan pengawasan. Dari kedua definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa pengendalian internal pada dasarnya merupakan usaha pengawasan yang dijalankan perusahaan atas kinerja karyawannya. Perusahaan dalam operasionalnya mempunyai aktivitas yang tinggi dan seringkali pihak manajemen tidak mampu menguasai secara langsung atas jalannya suatu operasi. Untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks, maka perlu diciptakan suatu sistem sebagai alat pengendalian intern.

### **Tujuan Pengendalian Internal**

Mulyadi (2001:163) menyebutkan bahwa tujuan dari dibuatnya system pengendalian internal adalah:

1. Menjaga Kekayaan Organisasi
2. Memajukan efisiensi dan kebenaran data akuntansi
3. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi
4. Membantu menjaga agar tidak ada kegiatan maupun prosedur yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

### **Kerangka Pengendalian Internal**

Terdapat beberapa kerangka pengendalian internal yang dapat dijadikan acuan bagi organisasi dalam mengembangkan system pengendalian internalnya (Commitee of Sponsoring Organizations ( COSO ) of the Treadway Commision. 2004 ). Adapun kerangka yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- COSO

Pengendalian internal menurut COSO ( Commitee Of Sponsoring Organization) adalah :

“ Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut :

- a) Keandalan Pelaporan Keuangan

- b) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- c) Efektifitas dan efisien operasi

### **Model Pengendalian Internal COSO**

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) menyatakan bahwa untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan COSO mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berhubungan, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian (control environment)
2. Penilaian Risiko
3. Informasi dan Komunikasi
4. Aktivitas Pengendalian
5. Pemantauan

### **Dasar Hukum Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP bersifat menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Ia bukan bagian terpisah dari kegiatan, ataupun ditambahkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang telah disusun.

### **Pengertian Audit**

Menurut Mulyadi (2002:9) “ Pengertian Audit adalah adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

### **Pengertian Audit Manajemen**

Menurut Alejandro R Gorospe (2000:2) dalam buku yang berjudul *Management Audit Suatu Pengantar* yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal, “Audit Manajemen adalah suatu teknik yang secara teratur dan sistematis digunakan untuk menilai efektivitas unit atau pekerjaan dibandingkan dengan standar-standar perusahaan dan industri, dan menggunakan petugas yang bukan ahli dalam lingkup objek yang dianalisis, untuk menyakinkan manajemen bahwa tujuannya dilaksanakan, dan keadaan yang membutuhkan perbaikan ditemukan”  
Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas maka audit manajemen dirancang secara tersistematis untuk mengaudit aktivitas-aktivitas, program-program, yang telah atau akan diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan serta visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan.



### **Tujuan dan manfaat audit manajemen**

Menurut IBK.bayangkara (2008:4) dalam bukunya yang berjudul Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi yang menyatakan "Ada 3 elemen pokok dalam tujuan audit yaitu kriteria, penyebab, akibat". Adapun penjelasan untuk tiga (3) elemen pokok menurut Bayangkara adalah sebagai berikut :

- Kriteria (Criteria)  
Kriteria merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya.
- Penyebab (Cause)  
Penyebab merupakan tindakan (aktivitas) yang dilakukan oleh setiap individu/kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif, atau sebaliknya negatif, program-program/aktivitas berjalan dengan tingkat efektivitas, efisiensi yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.
- Akibat (effect)  
Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program/aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat positif menunjukkan bahwa program/aktivitas telah terselenggara secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang ditetapkan.

### **Kebutuhan Audit Manajemen bagi Suatu Organisasi**

Menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya manajemen audit suatu pengantar (2006 : 20 ) "Suatu audit manajemen dibutuhkan apabila manajemen sedang menghadapi salah satu masalah yaitu: adanya petunjuk bahwa aspek manajemen kegiatan operasi perusahaan atau pekerjaan tertentu menuntut adanya perbaikan untuk meningkatkan ekonomi, efisiensi, efektivitas yang mencakup penilaian performa manajemen, perencanaan manajemen, sistem pengendalian kualitas (Quality Control Management), serta aktifitas operasi khusus dan departemen".

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan deskriptif. Menurut Williams (1995) dan Moleong (2008) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic (naturalistic research), karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting). Disebut juga penelitian etnografi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Selain itu disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan dianalisis lebih bersifat kualitatif.

Pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada pengamatan dan penilaian tentang bagaimana peranan system pengendalian internal pada instansi tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian maka batasan masalah yang diangkat adalah mengenai penerapan system pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah kabupaten Tulungagung. Obyek penelitian ini adalah kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tulungagung yang terletak di jalan A. Yani Timur kabupaten Tulungagung

Moleong (2004:103) mengatakan bahwa teknik analisis data merupakan pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hypothesis kerja seperti yang disarankan data dan untuk meningkatkan pemahaman bahan-bahan tersebut untuk di persentasikan kepada orang lain. Teknik dalam menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penulis berusaha menganalisis dan menjabarkan semua yang terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penilaian SPI menggunakan COSO untuk mempelajari dan menganalisa kegiatan yang terjadi pada obyek penelitiannya sebagai dasar atau landasan untuk mendeskripsikan sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian tersebut memberikan dampak yang baik bagi kinerjanya. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh maka data akan diolah dan di analisis menggunakan COSO sehingga data tersebut menjadi data yang berarti dan berguna. Data diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan COSO

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis SPI bagian aset kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengelolaan aset daerah.**

Dengan menggunakan metode COSO yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, maka hasil analisis SPI terkait pengelolaan aset yang dilakukan bagian aset kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Lingkungan Pengendalian**

Hasil analisis terhadap lingkungan pengendalian pada BPKAD Bagian Aset Kabupaten Tulungagung dapat diketahui bahwa pimpinan aset memiliki komitmen terhadap integritas dan nilai etika untuk diri sendiri ataupun untuk memotivasi karyawan. Pimpinan memiliki kesadaran akan etika dalam bekerja maupun dalam memotivasi bawahannya. Dalam konsep umum aspek pimpinan sektor publik selalu ditempatkan pada posisi yang hirarkhis, dimana seorang pimpinan harus menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan para pegawai. Penempatan posisional ini merupakan salah satu aspek penting yang dipergunakan oleh sang pemimpin dalam menjalankan tugasnya, yakni proses mempengaruhi orang lain agar dapat dilakukan secara efektif terhadap para pengikutnya, baik pengikut dalam arti pegawai yang terdapat suatu instansi. Pada BPKAD Bagian Aset Kabupaten Tulungagung pimpinan merupakan puncak pimpinan dinstansi dengan selalu melakukan motivasi kepada pegawai sehingga aktivitas atau tugas yang menjadi tanggungjawab instansi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan atau instansi.

Namun demikian kendala yang terjadi yaitu pada bagian aset ini belum ada pengendalian tertulis terkait kode etik tersebut secara komprehensif yang dapat dijadikan acuan kerja bagi semua orang yang ada pada bagian aset tersebut. Sehingga etika dalam bekerja hanya didapat dari arahan pimpinan dan kesadaran dari diri masing-masing. Hal ini dapat mengindikasikan akan terjadi kurangnya kualitas kerja dari para pekerja, karena salah satu faktor pendukung tercapainya suatu visi dan misi yang telah ditetapkan adalah memperhatikan etika dari para pekerjanya. Sehingga diperlukan sebuah dokumen atau file yang menyangkut kode etik dalam bekerja baik itu tercantum dalam aturan kerja yang ada di BPKAD, atau lebih spesifikasi kepada bagian asetnya, baik itu berupa aturan ataupun filosofi yang dapat menyadarkan pekerja akan pentingnya kode etik dalam bekerja. Dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat permasalahan yang sering terjadi karena tidak adanya file yang menegaskan akan pentingnya kode etik tersebut. Wawancara dilakukan langsung kepada kepala bidang bagian aset, sebagai berikut :

“kalau secara lisan, pasti saya selalu memberikan motivasi kerja kepada seluruh bawahan saya, namun untuk peraturan itu sendiri di bagian aset, itu belum ada yang menyangkut tentang kode etik. Kalau permasalahan yang sering terjadi, paling cuma ketidakpatan waktu para pekerja untuk menyelesaikan tugasnya, maupun

dalam absensi. Sering juga telat dalam ikut upacara pagi, padahal upacara pagi itu juga salah satu kegiatan yang wajib di kalangan pegawai. Saya sudah sering memperingatkan, namun tetap sering terjadi kejadian seperti itu. Ya jadi, cuma bisa nunggu teguran dari atasan yang lebih tinggi lagi “

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya adanya peraturan yang menjelaskan tentang kode etik yang wajib dibaca dan di aplikasikan oleh para pegawai yang ada di bagian aset agar dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya etika tersebut. Kondisi yang terjadi selama ini instansi belum menerapkan peraturan secara tegas terkait dengan kode etik yang harus dilakukan dan ditaati oleh pegawai sehingga menjadikan para pegawai kurang memiliki kedisiplinan dalam menjalankan peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi.

Hasil analisis struktur organisasi pada BPKAD Bagian Aset secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: Fungsi operasional dalam melakukan aktivitasnya menggunakan berbagai sumber daya atau ekonomi yang dimiliki oleh instansi. Penggunaan sumber daya ekonomi instansi tersebut diawasi dengan adanya pencacatan. Dalam melakukan pencacatan tersebut bagian ini terpisah dengan bagian operasional perusahaan yaitu bagian anggaran. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan atau menjamin bahwa tidak akan terjadi suatu kecurangan yang dapat dilakukan oleh bagian yang terkait dalam proses operasional instansi. Pada sisi yang lain dengan adanya pemisahan tersebut maka dapat menghindari resiko terjadinya penyelewengan yang dapat terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada bagian aset ini sudah ada *job desk* yang menjelaskan tugas dan wewenang pada pegawainya sesuai kebutuhan entitas.

Berdasarkan hasil analisis *job desk* membuktikan bahwa bahwa seorang pegawai telah di tempatkan sesuai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan dapat dilihat dari latar belakang pendidikan para pekerja yang ada di bagian aset BPKAD Tulungagung. Hasil analisis mengenai SDM atau pegawai pada BPKAD Bagian Aset Tetap menunjukkan adanya para pegawai yang berkompeten di bidang masing-masing, dimana seluruh pegawai telah memiliki pendidikan terakhir yaitu minimal Sarjana. Kenyataan tersebut menjadikan keberadaan pegawai atau SDM yang terdapat di instansi dapat mendukung proses pengendalian yang dilakukan.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa pada bagian aset, sering terjadi perputaran personil (keluar /masuk) yang sangat tinggi, namun permasalahan disini, walau seringnya keluar masuk personil, namun bagian aset menunjukkan bahwa kurangnya para pegawai yang ada di bagian aset ini dalam mengelola aset daerahnya. Kondisi ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut:

”Kalau dibilang kurang sih, ya kita kekurangan, karena hanya 17 personil yang ada di bagian aset ini untuk mengelola seluruh aset yang ada di Kabupaten Tulungagung ini”. (Bapak Robinson)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini secara kuantitas bagian aset BPKAD Tulungagung masih mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga proses pengelolaan aset belum berjalan

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kenyataan tersebut menjadikan aktivitas operasional instansi belum secara maksimal dilakukan. Namun demikian dari segi kualitas pegawai telah sesuai dengan kebutuhan, dimana secara keseluruhan Kepala bidang, kepala sub bidang analisis kebutuhan dan inventarisasi semua memiliki latar belakang pendidikan sarjana.

Setiap pegawai pada bagian aset BPKAD Tulungagung entitas memiliki wewenang dan tanggung jawab sehingga wewenang dan tanggung jawab para pegawai menjadi hal utama untuk dilakukan suatu kajian atas keberadaan para pegawai. Namun demikian selama ini peraturan yang terkait kode etik yang dapat memaksimalkan kinerja para pegawai belum diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam proses pengambilan keputusan di kaitkan dengan wewenang dan tanggung jawab para pegawai sehingga dapat memberikan dukungan atas upaya pemberdayaan pegawai terkait dengan tugas dan tanggungjawab para pegawai dalam bekerja di instansi. Namun tetap mempertimbangkan pendapat dari seluruh jajaran yang ada sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama yang harus dilaksanakan.

Setiap pegawai menyadari tanggung jawab dan ekspektasi terhadap tugas dan tanggungjawab kerja. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kemangkiran yang dilakukan oleh pegawai karena tidak ada aturan yang melekat yang dapat menegaskan terkait etika dalam bekerja tersebut. Bentuk-bentuk kemangkiran tersebut terkait secara langsung dengan kewajiban dan tanggungjawab kerja yang harus dilakukan. Selama ini para supervisor bertemu dengan para pegawai secara berkala guna mereview kinerja para pegawai dan memberikan saran-saran perbaikan, hal tersebut telah dilakukan oleh bagian aset BPKAD Tulungagung, namun tidak ada waktu yang dapat dipatok kapan harus diadakan *review* kinerja tersebut. Argumen ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Pak Robinson :

“Ya pasti ada sih kalau untuk mengukur kinerja dari para pegawai, terutama saya sendiri yang langsung turun, tapi waktunya tidak tentu. Ya menurut saya perlu aja di nilai, baru saya mereview kinerja mereka“

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja pegawai harus dilakukan sehingga dapat ditentukan kebijakan yang tepat terkait dengan pencapaian kinerja para pegawai selama ini. Apabila telah diketahui pencapaian kinerja para pegawai maka pengambilan kebijakan dapat sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi

Tindakan manajemen yang memadai untuk merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dengan memanggil pegawai yang bersangkutan terus memberikan peringatan agar tidak melakukan kesalahan lagi. Hasil tersebut dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Robinson selaku Kepala bidang bagian asset, yang menyatakan bahwa:

Saya selalu pimpinan selalu berupaya untuk menciptakan kondisi kerja yang stabil, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai secara langsung akan saya selesaikan yaitu dengan memberikan teguran

secara langsung kepada pegawai yang melanggar. Apabila pelanggaran tetap terjadi maka tindakan tegas akan saya ambil untuk memberikan efek jera kepada pegawai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa selama ini pimpinan selalu menjalankan peraturan secara tegas sehingga dengan memberikan tindakan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa prosedur kerja telah dilaksanakan secara maksimal.

### **Penilaian Resiko**

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pimpinan yang berada di bagian aset telah memikirkan risiko yang terjadi dalam pengelolaan aset. Bentuk risiko yang dapat terjadi dalam proses pengendalian aset yaitu berupa aset yang tidak bersertifikat sehingga terjadi permasalahan sengketa. Pimpinan selalu berupaya untuk menghindari terjadinya risiko yang dapat terjadi sehingga memberikan dampak pada periode berikutnya. Pimpinan organisasi telah menetapkan tujuan umum organisasi dalam bentuk visi misi tujuan dan sasaran. Penetapan visi dan misi sebagai bentuk riil yang akan dicapai oleh instansi sehingga dapat digunakan sebagai arah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pimpinan selalu berupaya untuk menjalankan misi dan visi secara benar sehingga seluruh kegiatan operasional telah disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya untuk melakukan penilaian risiko terkait pengelolaan asetnya pimpinan selalu mengklasifikasikan aset-aset mana yg cenderung akan menimbulkan risiko di kemudian hari. Upaya ini menunjukkan bahwa selama ini pimpinan selalu berupaya untuk menghindari terjadinya permasalahan terkait dengan aset yang dimiliki oleh instansi. Bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi dalam hal ini mengenai aset-aset yang tidak memiliki sertifikat yang menjadikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Penilaian risiko tersebut berpengaruh terhadap penetapan tujuan umum dan sasaran. Pada sisi yang lain penilaian risiko juga dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa aset yang dimiliki oleh instansi benar-benar memiliki sertifikat sehingga permasalahan terkait dengan keberadaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memiliki kekuatan secara nyata.

Dalam mengelola asetnya risiko yang sering terjadi atau yang menjadi pertimbangan adalah risiko penggunaan aset yg mungkin belum disertai berita acara. Berita acara tersebut digunakan sebagai bukti terkait dengan keberadaan aset yang dimiliki oleh instansi. Dalam berita acara tersebut secara lengkap disajikan mengenai keberadaan aset dan spesifikasi aset sehingga dapat digunakan sebagai dasar pencatatan sehingga aset secara jelas mendapatkan pengakuan oleh instansi. Cara pimpinan dalam melakukan pengidentifikasian dan penilaian risiko pengelolaan aset tetap nya dengan melakukan appraisal terhadap aset tetapnya sehingga risiko yg akan timbul dapat diminimalisir. Identifikasi terhadap aset juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dampak yang kurang baik atau negatif dari keberadaan aset dan menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat terjadi.

Pimpinan mendiskusikan terkait resiko pengelolaannya kepada personil yang ada di bagian aset. Upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa aset yang dimiliki instansi dengan sepenuhnya telah mendapatkan pengawasan secara maksimal sehingga segala bentuk penyimpangan dapat dihindarkan. Bentuk penyimpangan tersebut secara langsung menjadi sumber permasalahan dalam pengelolaan aset yang dilakukan. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pimpinan juga mengidentifikasi resiko dari pengelolaan aset tetap dari kinerja personil nya. Identifikasi dilakukan sebagai upaya untuk melakukan suatu proses pengendalian aset yang dimiliki sehingga seluruh aset yang dimiliki dapat dikendalikan secara menyeluruh dan memberikan jaminan proses pengendalian telah dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa bagian aset telah dengan baik melakukan penilaian risikonya. Dimana pimpinan pada bagian aset dalam penetapan tujuan umum dan sasarannya telah memikirkan akan resiko yang mungkin akan terjadi dalam pengelolaan asetnya, salah satunya pimpinan dalam melakukan penilaian resiko terkait pengelolaan asetnya dengan mengklasifikasikan aset-aset mana yg cenderung akan menimbulkan resiko di kemudian hari. Pimpinan juga terkait resiko pengelolaannya kepada personil yang ada di bagian aset, cara pimpinan dalam melakukan pengidentifikasian dan penilaian resiko pengelolaan aset tetap nya dengan melakukan appraisal terhadap aset tetapnya sehingga resiko yang akan timbul dapat diminimalisir. Disini timbul permasalahan, yaitu appraisal yang dipakai adalah appraisal eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengidentifikasian risikonya tidak ada pengawasan dari internal itu sendiri, karena akan lebih efektif apabila tim *appraisal* itu sendiri adalah satu divisi yang ada dalam bagian aset itu sendiri agar lebih mengetahui kondisi yang terjadi yang ada di dalam bagian aset itu sendiri dalam melakukan pengelolaan asetnya.

#### **Aktivitas Pengendalian**

Bagian aset BPKAD Tulungagung dalam melakukan aktivitas pengendalian terkait dengan aset yang dimiliki, bentuk-bentuk aktivitas yang terkait dengan aktivitas pengendalian aset yaitu sebagai berikut:

1. Dalam mengendalikan asetnya cara bagian aset melakukan pengendalian terhadap aset tetapnya dengan melakukan sertifikasi terhadap aset tetapnya. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah nyata dari instansi untuk memberikan jaminan atas keberadaan aset yang dimiliki oleh instansi sebagai bentuk pengendalian atas keberadaan aset yang dimiliki instansi.
2. Ada kebijakan dan prosedur tertulis yang menjelaskan tentang pengendalian aset tersebut. Kebijakan ini digunakan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan dalam proses pengendalian atas keberadaan aset yang dimiliki oleh instansi. Prosedur tertulis tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pencatatan aset sehingga keberadaannya dapat secara maksimal dikendalikan dengan benar sesuai dengan kondisi aset yang sebenarnya.
3. Bagian aset melakukan pengendalian aset memakai sistem komputer. Kenyataan ini menunjukkan bahwa instansi selalu berupaya untuk menjaga

akurasi atas proses pengendalian aset yang dilakukan, Dengan menggunakan komputer segala bentuk transaksi dapat tertulis secara jelas sehingga proses pengendalian dapat secara maksimal dilakukan.

4. Kebijakan instansi dengan melakukan croscek antara data di komputer dengan kondisi riil yang ada terkait aset tersebut dengan mencocokkan dari laporan pengurus barang selanjutnya dilanjutkan dengan cek ke lapangan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk nyata dari upaya instansi untuk menjadikan aset daerah sebagai aset negara yang perlu dilakukan suatu pengendalian secara tepat sehingga memberikan dampak positif atas upaya instansi mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan.
5. Kewenangan untuk mengendalikan seluruh aktifitas kunci dipisahkan. Hasil ini menunjukkan bahwa instansi selama ini benar-benar selalu berupaya untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas pengendalian aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui pemisahan kewenangan bagi instansi akan memberikan jaminan bahwa kegiatan kecurangan yang akan dilakukan oleh suatu bagian dapat dihindarkan. Selain itu pemisahan kewenangn juga dilakukan sebagai langkah nyata instansi bahwa aset telah dikendalikan secara tepat dan oleh bagian yang tepat pula.
6. Terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam otorisasi, penyetujuan, pemrosesan, pencatatan, pembayaran atau penerimaan uang dan fungsi penyimpanan. Kebijakan ini dapat mencerminkan sejauh mana instansi benar-benar berupaya untuk mengendalikan seluruh aktivitas operasional pengendalian aset sehingga dapat memberikan jaminan bahwa aset yang dimiliki pemerintah daerah benar-benar telah dikendalikan secara tepat dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan.

Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam aktifitas pengendalian asetnya cara bagian aset melakukan pengendalian terhadap aset tetapnya dengan melakukan sertifikasi terhadap aset tetapnya. Pengendalian tersebut tercantum dalam kebijakan dan prosedur tertulis yang menjelaskan tentang pengendalian aset tersebut dan juga tertuang dalam tupoksi kasubid pengamanan dan pengendalian. Dalam pengendalian asetnya, bagian aset melakukan pengendalian aset memakai sistem komputer, cara melakukan *crocek* antara data di komputer dengan kondisi riil yang ada terkait aset tersebut dengan mencocokkan dari lapangan, pengurus aset selanjutnya ditindaklanjuti dengan emalkukan cek ke lapangan dengan kewenangan untuk mengendalikan seluruh aktifitas kunci dipisahkan. Hal ini juga diperkuat dari bukti yang berupa terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam otorisasi, penyetujuan, pemrosesan, pencatatan, pembayaran atau penerimaan uang dan fungsi penyimpanan. Sehingga kesimpulan akhir untuk aktivitas pengendaliannya, bahwa bagian aset mempunyai aktifitas dalam pengendalian yang baik.

#### **Informasi dan komunikasi**

Apabila dikaitkan dengan proses informasi dan komunikasi yang dilakukan pada Bagian aset BPKAD Tulungagung, maka instansi telah melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa aktivitas operasional pengendalian aset telah dilakukan sesuai



dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Robinson, yang secara lengkap yaitu sebagai berikut:

“Dalam upaya untuk meningkatkan informasi dan komunikasi yang dilakukan pada dinas maka langkah strategis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sistem informasi dengan memberitahukan kepada skpd untuk secara rutin melaporkan asetnya per triwulan, semester dan pertahun. Selanjutnya kebijakan dalam proses pengendalian aset yaitu dengan membuat laporan sesuai dengan kartu inventaris barang ( KIB ) lalu merekap KIB yang sudah dilaporkan SKPD menjadi rekapan berdasarkan per KIB. Kebijakan ini dilakukan agar seluruh SKPD memiliki tanggungjawab penuh atas keberadaan aset. Langkah selajutnya yaitu dengan memanggil SKPD lalu memberikan pengarahan mengenai tindakan yang harus dilakukan yang akan dibahas dengan mengadakan rapat intern terkait dengan kebijakan pengendalian aset daerah. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu pimpinan selalu memberikan petunjuk agar setiap personil melakukan tanggungjawabnya masing-masing sehingga mempermudah proses pengawasan.

Beberapa kebijakan terkait dengan informasi dan komunikasi tersebut dapat mencerminkan adanya upaya dari instansi untuk memberikan jaminan atas proses pengendalian yang dilakukan sebagai upaya pengelolaan aset dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### **Hasil Analisis perencanaan dan penganggaran BPKAD Bagian Asset Tetap ( perencanaan & penganggaran,)**

Proses perencanaan dan Anggaran Asset Tetap, awalnya tercantum dalam Dasar Perencanaan Anggaran terkait aset (DPA) yang disusun dan dijalankan oleh masing-masing SKPD selaku pengguna. Pengelola yaitu bagian asset BPKAD bersama pengguna (SKPD) membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD yang bersangkutan dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk menetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD ) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMMD ). Akan tetapi, pada satu sisi, setelah RKBMD dan RKPBMMD serta APBD ditetapkan, penyusunan DPA yang merupakan Dasar Perencanaan Anggaran terkait aset itu sendiri disusun dan dibuat oleh pihak pengguna yaitu SKPD yang bersangkutan dengan diawasi oleh bagian anggaran dan pada akhir periode SKPD yang bersangkutan akan membuat laporan pertanggungjawaban atas DPA tersebut sehingga dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaporan disini hanya dilaksanakan oleh satu bagian sehingga tidak dapat menjalankan ketentuan sistem dan prosedur pengendalian dengan tepat. Dimana seharusnya bagian penyusunan dan pelaporan harus terpisah sehingga sistem perencanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan atau anggaran yang telah ditetapkan. Dengan kondisi seperti yang dijelaskan akan

menimbulkan sedikit celah yang dapat menimbulkan beberapa kejadian yang tidak terduga seperti halnya, ketidak akuratan Dasar perencanaan yang telah dibuat, dan kesalahan informasi yang tercantum didalam DPA itu sendiri serta Kondisi tersebut mempermudah kedua bagian tersebut untuk melakukan kecurangan data dari perencanaan dan anggaran dapat dengan mudah dilakukan sehingga seolah-olah pencapaian kinerja keuangan telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Seharusnya dalam penyusunan DPA dapat dilakukan oleh bagian Aset sebagai pengelola yang ada di BPKAD dimana RKBMD dan RKPBM yang sudah didiskusikan dan diusulkan oleh pengguna yaitu SKPD sebagai dasar pembuatan DPA itu sendiri agar dokumen DPA itu dapat dipertanggungjawabkan dengan otorisasi yang terpisah dari pengguna (SKPD) sebagai pelaksana dan dapat mengurangi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan seperti yang dijelaskan sebelumnya dan juga dapat mengurangi kesalahan pengawasan dari bagian anggaran karena banyaknya DPA yang dibuat oleh seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Tulungagung yang kemungkinan akan sulit diawasi satu per satu oleh bagian anggaran.

Opsi lain yang dapat diberikan terkait pengendalian perencanaan asset yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah dengan penambahan 1 bagian khusus dibidang Anggaran yang bekerjasama dengan Bagian Aset sehingga terbentuk 1 Tim khusus yang terdiri dari bagian Anggaran dan Aset untuk membuat dan mengawasi DPA yang berdasar dengan RKBMD dan RKPBM dan selanjutnya DPA tersebut akan didistribusikan kepada pengguna yang telah mengajukan dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD. Sehingga dengan adanya tim khusus tersebut dapat mengurangi akan kesalahan informasi serta kecurangan yang dapat dilakukan oleh bagian SKPD yang akan melaporkan pertanggungjawabannya terhadap DPA tersebut.

### **Hasil Analisis Prosedur pengelolaan aset tetap di BPKAD Bagian Asset Tetap ( prosedur )**

Sistem dan prosedur pengelolaan ativa tetap yang dilakukan BPKAD Bagian Asset Tetap telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 Tahun 2009 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melakukan pengelolaan atas prosedur asset tetap di BPKAD Bagian Asset Tetap terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, investarisasi dan pelaporan. Adapun masing-masing prosedur dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Pembukuan**

- 1) Pengguna/ kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)

- 2) Pengguna/ kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format:
  - a) Kartu Investaris Barang (KIB) A Tanah (Form 6)
  - b) Kartu Investaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin (Form 7 )
  - c) Kartu Investaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan (Form 8)
  - d) Kartu Investaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan (Form 9)
  - e) Kartu Investaris Barang (KIB) E Asset tetap lainnya (Form 10)
  - f) Kartu Investaris Barang (KIB) F Konstruksi dan Pengerjaanya (Form 11)
  - g) Kartu Investaris Ruangan (KIR) (Form 12)
- b. Investarisasi

Investaris merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan peloran barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/ merek atau tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan lain sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap dan teratur dan berkelanjutan mempunyai peran dan fungsi sangat penting dalam rangka:

  - a. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dana pengawasan setiap barang.
  - b. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing.
  - c. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.
- c. Pelaporan
  1. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran tahunan dan 5 (lima) tahun kepada pengguna.
  2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Bupati melalui pengelola.
  3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasi sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

#### **Pencatatan (Pencatatan/ perlakuan asset)**

Dalam proses pencatatan atau perlakuan asset tetap yang dilakukan pada BPKAD Bagian Asset Tetap menunjukkan adanya permasalahan yaitu terkait dengan asset tetap yang dicatat dengan harga perolehan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pencatatan belum dilakukan secara tepat atas perlakuan akuntansi pada asset tetap sehingga terjadi perbedaan pencatatan aset tetap yang menggunakan harga perolehan sebagai dasar pencatatan dan pelaporannya dengan aset riil yang ada di kabupaten Tulungagung. Pada kabupaten tulungagung, tidak terdapat kebijakan untuk

melakukan depresiasi aset tetap sehingga pelaporannya pada laporan keuangan hanya menggunakan nilai perolehan dengan menggunakan jurnal korolari untuk mencatat aset baru kedalam neraca tahun bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu staff di bidang akuntansi terkait pelaporan, sebagai berikut :

*"Kalau di sini perlakuan akuntansi untuk pencatatan aset tetap masih menggunakan harga perolehan, itu karena disini masih berbasis kas dan menggunakan jurnal korolari untuk melaporkannya kedalam neraca yang ada dalam laporan keuangan". ( Ibu Rindang )*

Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan pada laporan keuangan yang di terbitkan oleh BPKAD Kabupaten Tulungagung Tahun 2012, bahwa akun depresiasi aset tetap menunjukkan angka 0,00. Dengan ditemukannya permasalahan terkait pencatatan aset tetap yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diberikan saran agar Pemerintahan Kabupaten Tulungagung dapat secepatnya merealisasikan pencatatan akuntansi menggunakan metode yang ada pada SAP PP No 71 Tahun 2010 lampiran I.08 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No.07 terkait Akuntansi Aset Tetap, agar pencatatan Akuntansi yang akan menjadi Laporan Keuangan dapat sesuai antara Pencatatan yang ada Dengan Aset Riil sebenarnya yang ada di Kabupaten Tulungagung.

#### **Analisis Sistem Pelaporan Aset ( Pelaporan )**

Seperti dijelaskan diatas, dijelaskan bahwa pelaporan aset tetap menggunakan metode berbasis kas, sehingga pelaporan aset yang dilaporkan dilaporan keuangan masih menggunakan harga perolehan dan tidak dilakukan depresiasi. Selain itu terkait pelaporan Aset tetap dari SKPD, dalam pelaporannya tidak sesuai dengan data yang terdapat aset riil dan pelaporan belanja modal yang secara keseluruhan dilaporkan sehingga terjadi perbedaan data. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut :

*"Kadang-kadang ada beberapa SKPD, Laporan Asetnya tidak sesuai dengan data yang kita punya dimana ada beberapa belanja modal yang belum dilaporkan sehingga ada perbedaan data". ( Bapak Ronald)*

Adanya perbedaan data tersebut dapat menceminkan kemampuan SKPD dalam proses pengakuan atau perlakuan dari aktiva tetap yang dimiliki sehingga terjadi perbedaan antara keberadaan aset secara riil dengan pelaporan belanja modal yang disampaikan. Kenyataan tersebut juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya ketidak tepatan atau kecurangan bagian penyusunan anggaran dan pelaporan aset yang telah dilakukan, mengingat kedua bagian tersebut dikelola atau dilakukan oleh satu bagian saja yaitu SKPD selaku pengguna sehingga pengendalian sangat sulit dilakukan dengan benar sesuai dengan sistem dan prosedur yang tepat

#### **Pemantauan**

Pemantauan SPI pada BPKAD kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan oleh pihak Inspektorat kabupaten Tulungagung. pemantauan SPI yang dilakukan inspektorat kabupaten Tulungagung juga mencakup pemantauan

SPI yang ada dalam bagian Aset terkait pengelolaan asetnya. Hal ini dikarenakan pada akhir periode bagian aset harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan terkait asetnya pada laporan keuangan yang nantinya akan di audit oleh BPK. Sehingga sangat penting pemantauan atas SPI pada keseluruhan BPKAD termasuk bagian aset. Periode pemantauan yang dilakukan inspektorat dalam melakukan pemantauan atau penilaian atas SPI dilakukan dua bulan setelah laporan keuangan diterbitkan sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bagian aset BPKAD Kabupaten Tulungagung memiliki sistem pengendalian internal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007. Dimana setelah dilakukan analisis SPI menggunakan metode COSO dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal terkait pengelolaan aset daerah yang dilakukan bagian aset BPKAD Kabupaten Tulungagung telah berjalan baik dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun ada beberapa titik yang masih menjadi kelemahan dan harus diperbaiki dengan merujuk pada saran atas perbaikan yang telah diberikan oleh penulis melalui hasil analisis yang dilakukan. Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagian pengadaan tenaga kerja atau pegawai harus melakukan evaluasi terkait dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang ditempatkan pada BPKAD Bagian Asset tetap. Upaya tersebut dilakukan agar jumlah pegawai yang berkerja sesuai dengan jumlah kebutuhan, sehingga para pegawai dapat bekerja secara lebih maksimal.
2. Diharapkan Bagian Aset mempunyai Peraturan yang lebih komprehensif yang menagtur tentang etika dalam bekerja untuk mencapai maksimalnya kinerja dari para pegawainya.
3. Dalam proses pencatatan atau perlakuan asset tetap yang dilakukan pada BPKAD Bagian Asset Tetap diharapkan berdasarkan kondisi asset riil yang dimiliki oleh instansi sehingga terjadi persamaan antara pencatatan aset tetap dengan harga perolehan.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. Peraturan bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2011 *Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung. Tulungagung.*
- \_\_\_\_\_, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Keuangan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 *tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta.
- BPKAD Tulungagung, 2009. Peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 8 tahun 2009 *tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Tulungagung.
- Baridwan, Z. (1991). *Sistem Akuntansi - Penyusunan Prosedur dan Metode* Edisi ke-5. BPFE. Yogyakarta.
- Bayangkara, IBK., 2008. *Audit manajemen Prosedur dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Bodnar, G., H., dan William S., H. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9. Andi. Yogyakarta
- Commite of Sponsoring Organizations ( COSO ) of the Treadway Commision. 2004. *Enterprise Risk Manahement – Integrated Framework*.
- Sari, D. 2009. *Skripsi : Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Widyagama. Malang.

Gelinas, Orams, dan Wiggins. 1997. (<http://blog.re.or.id/definisi-sistem-informasi-akuntansi.htm>).

Kosasih, 2005. (<http://samsurimunaz.wordpress.com/>).

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. edisi ke-3. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi; YKPN. Yogyakarta.

Mardiasmo. Nd. *Jurnal Akuntansi dan Audit : Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik JAAII Volume 6*.

McLeod, & Raymond. (2001). *Sistem Informasi Edisi 7 Jilid 2*. Prenhallindo: Jakarta.

Moleong, L., J., & Williams (2002). *Metode Penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

Nelson, M., Shaw, M., dan Schoonmaker, M. (2002). *Benefits and Valuation of Technology Alliances in Supply Chains*. INFORMS Annual Meeting 2002, e-Business: Integrating Academic and Industrial Personnel track, San Jose, CA.

O'Brien, J., A., dan Marakas, O. (2008). *Management Information Systems*. McGraw-Hill Education, New York.

Ridwan, A. 2006. *Skripsi : Analisis pengendalian internal atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah ( studi kasus di kabupaten sorong selatan, provinsi papua barat)*. papers.gunadarma.ac.id. Jakarta.

Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business Buku2*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung..



Wilkinson, J., W., et al, 2000. Accounting Information System : *Essential Concept Information System*, 7th edition Addition-Wesley Publishing Company; Inc